

PERAN LURAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Suatu Study di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan)

Oleh : **MONFI ADE CANDRA**

Masalah kemiskinan pada masyarakat merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh (Suharto, 2005). Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah seperti Inpres No. Tahun 1995 tentang penanggulangan kemiskinan yang pernah dilakukan seperti jaring pengaman sosial, program KUT, bahkan sampai saat ini pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan berbagai program bantuan paket, maupun pendanaannya. (Soeharto, 2005). Pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan memiliki banyak program antara lain melalui program PNPM Mandiri yaitu program PNPM pedesaan atau program pengembangan Kecamatan (P2K) PNPM Perkotaan atau program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) serta PNPM infrastruktur pedesaan atau program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Namun, secara umum Indonesia kaya sumber daya alam, penyebab kedua, kemiskinan kultural, yakni disebabkan oleh budaya atau etos kerja seseorang, seperti malas, boros, dan susah menerima inovasi, faktor ketiga, kemiskinan struktural, yang disebabkan kebijakan pemerintah yang salah, atau tidak memihak kepada rakyat.

Di propinsi Sulawesi utara angka kemiskinan masih sangat tinggi yakni masih terdapat 14,48 %

atau diatas dari angka kemiskinan secara nasional. (Data BPS Propinsi Sulawesi Utara tahun 2012).

Perlu difahami bahwa masalah kemiskinan terkait dengan berbagai dimensi lainnya, antara lain dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan (alam dan geografis), kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Menelaah kemiskinan secara multi-dimensional sangat diperlukan untuk memahami secara komprehensif sebagai pertimbangan perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan tersebut tentu sangat terkait dengan masalah rendahnya sumberdaya manusia hal ini dapat diakui karena memang secara faktual penduduk kita

masih memiliki latar belakang pendidikan yang belum memadai. Permasalahan lain dipengaruhi oleh rendahnya etos kerja masyarakat, rendahnya etos kerja mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang selain itu masalah kemiskinan pada masyarakat sangat terkait dengan pola hidup konsumtif karena pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk menyisihkan hasil usaha melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Selain itu program pemerintah yang belum memihak kepada rakyat miskin.

Masalah kemiskinan sebagaimana dikemukakan di atas juga dapat dijumpai pada masyarakat di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Dimana tercatat 340 KK penerima Raskin dan 325 KK penerima BLT dari keseluruhan jumlah penduduk 679 KK. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat sangat terkait dengan kepedulian pemerintah, dalam hal ini aparat pemerintah kelurahan khususnya peran Lurah. Karena Lurah menjadi titik sentral dan menjadi fokus perhatian bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di daerah kelurahan ada banyak program dalam upaya menanggulangi kemiskinan antara lain program P2KP, penyaluran dana BLT dan Raskin. Indikator yang dipakai untuk menentukan rakyat miskin berpatokan pada kriteria yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Statistik antara lain: penggunaan air minum, asset, pakaian, penggunaan bahan bakar, kebutuhan makan, tipe rumah, jenis jamban, jenis lantai, konsumsi daging, luas lantai, pendidikan, dan penerangan. Keempat belas kriteria tersebut di atas dijadikan landasan untuk menentukan kriteria kemiskinan penduduk sehingga mereka layak untuk mendapatkan dana ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitan dengan program penanggulangan kemiskinan. Diduga bahwa penentuan kriteria terhadap usaha penanggulangan kemiskinan khususnya di Kelurahan Pondang belum efektif disebabkan karena Lurah hanya menentukan dengan cara mereka sendiri, artinya berdasarkan kemauan Lurah itu sendiri tidak didasarkan pada apa yang disarankan oleh pemerintah Kabupaten, akibatnya masih ada sebagian golongan penduduk yang dianggap miskin tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dana atau fasilitas yang berhubungan dengan program penanggulangan kemiskinan. Semestinya kriteria itu menjadi patokan untuk dijadikan pegangan bagi Lurah mana yang berhak menjadi indikator dari kemiskinan. Sehingga berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil pokok bahasan

Skripsi ini dengan menitikberatkan pada: "Peran Lurah dalam menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan".

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana peran Lurah dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Pondang?
- 2). Apakah Lurah dalam menentukan keluarga miskin sudah dilakukan berdasarkan indikator kriteria kemiskinan?
- 3). Program-program Penanggulangan kemiskinan apa saja yang telah dilaksanakan Lurah di Kelurahan Pondang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Peran Lurah dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Pondang
- b. Mendapatkan gambaran tentang cara Lurah menentukan kriteria keluarga miskin.
- c. Mengetahui program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Lurah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kelurahan dalam menentukan kriteria kemiskinan. Dijadikan bahan evaluasi untuk dapat menjadi solusi untuk penentuan bagi kemiskinan penduduk khususnya yang terkait dengan peranan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan penduduk.

b. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu khususnya Ilmu Pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak yang berkompeten dalam bidang ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Lurah dan Pemerintah Kelurahan.

Dalam Kepmendagri No. 72 tahun 2005 dikatakan bahwa Pemerintah kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan (Lurah) dan perangkat kelurahan. Sedangkan perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris

kelurahan dan kepala-kepala lingkungan yang dalam susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan daerah dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (C.S.T. Kansil, 2002: 12).

Kepala Kelurahan (Lurah) adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur dengan syarat yaitu pendidikan minimal sekolah lanjutan pertama atau yang berpengalaman/berpengalaman sederajat dengan itu (Drs. Joko Siswanto, 2003).

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan di Kelurahan maka Lurah bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang yang mengangkatnya melalui Camat. (Amrah Muslimin, 1998 : 25).

Seorang Lurah pada dasarnya dilarang melakukan tindakan/kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajiban yang merupakan kepentingan negara, pemerintah daerah dan masyarakat di Kelurahan.

Sekretaris Kelurahan adalah unsure staf yang membentuk usaha kelurahan dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintahan kelurahan. Sekretaris kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan kepala-kepala urusan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan di kelurahan maka dapat dibentuk lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan.

Kepala kelurahan sebagai pemegang utama dibidang pembangunan maka ia juga dapat dibantu oleh satu lembaga masyarakat yang dulunya dikenal dengan LKMD kini berubah menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu mitra pemerintah kelurahan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (A.W. Wijaya, 2004).

B. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut :

- Perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh atau melakukan sesuatu.
- Pemerintah berarti badan yang menjalankan kekuasaan suatu negara.
- Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal, urusan dan sebagainya dari badan yang memerintah tersebut (Syafie, 1994:11).

Dalam bahasa sehari-hari orang mencampur adukkan penggunaan istilah pemerintah dan pemerintahan. Seolah-olah keduanya mempunyai arti yang sama. Padahal keduanya mempunyai arti yang ber-

beda.

Menurut Marjun, (1969), istilah pemerintahan menunjuk bidang tugas pekerjaan atau fungsi. Sedangkan istilah pemerintahan menunjukkan kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk pada objek sedangkan istilah pemerintah menunjuk pada subjek.

Pemerintahan dan pemerintah mempunyai arti sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara, kalau mengikuti pembidangan menurut Montesquieu pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara dalam bidang eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada seluruh aparat/alat perlengkapan negara yang menjalankan tugas dan kewenangan dalam arti sempit.

C. Konsep Kemiskinan

Menurut Syaifuddin (2003) kemiskinan mengandung banyak pengertian, berubah dari satu tempat ketempat yang lain pada setiap waktu, dan telah dideskripsikan dalam berbagai perspektif. Umumnya manusia tidak ingiin terperangkap kedalam kondisi kemiskinan .

Jadi diperlukan aksi kepedulian bagi kaum miskin dan lemah untuk mengurangi kemiskinan , sehingga keadaan bisa membaik.

Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan criteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan dan criteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan tergantung dari definisi mana yang digunakan (ADB,1999) . Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas,2002).

Bagi penduduk di Indonesia disebabkan menjadi : a). kemiskinan kronis (Chronic poverty) atau kemiskinan struktural yang terjadi terus menerus , dan b). kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi krisis . Pengertian tentang kemiskinan juga dapat diartikan dalam dua bagian yaitu pertama kemiskinan relatif, dan kedua kemiskinan absolut . Kemiskinan Relatif, dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan

Nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu. Kemudian karena biaya hidup di daerah kota dan pedesaan berbeda, demikian juga antara kelompok masyarakat didalamnya, maka oleh Bank dunia dipakai sebagai ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai US \$ 50 perkapita pertahun untuk tingkat pendapatan di desa, dan US \$ 75 perkapita pertahun untuk tingkat pendapatan di kota pada keadaan tingkat harga khususnya di tahun 1971.

Pada tahun 1973 WHO, FAO telah merekomendasi tentang jumlah Kalori dan protein untuk penduduk Indonesia, yang besarnya masing-masing 1900 Kalori dan 40 gram protein per orang/hari

D. Aspek dan sebab Terjadinya Kemiskinan.

Para ahli Ilmu-Ilmu Sosial dan Lembaga-Lembaga Pendidikan seperti Perguruan Tinggi, telah menaruh minat yang amat serius terhadap permasalahan kemiskinan. Perhatian serius tersebut mencakup betapa luasnya masalah kemiskinan. Pada beberapa decade 90-an kemiskinan memang sudah dibahas, dan di Indonesia pun sudah diselidiki sejak Negara RI mulai dibentuk mulai dibentuk, namun study secara sistematik tentang kemiskinan, adalah merupakan suatu upaya yang mendapatkan perhatian yang sangat serius dikalangan ahli-ahli Ilmu Sosial dan Lembaga Pendidikan. (Prayitno dan Lincoln, 1996).

Menurut Sajogyo (Dalam Prayitno dan Lincoln, 1996), beberapa aspek tentang kemiskinan dapat dirinci antara lain :

- a. Bahwa kemiskinan itu multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi social, politik, dan pengetahuan serta ketrampilan, dan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.
- b. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan

- c. atau kemunduran pada aspek lainnya,
- c. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar tentang kemiskinan pedesaan, kemiskinan perkotaan dan sebagainya namun ini bukan berarti desa atau kota yang mengalami kemiskinan tetapi penduduk atau manusianya yang menderita tentang kemiskinan. Bank Dunia sendiripun telah mengajukan beberapa aspek kemiskinan, yaitu pendapatan rendah, kekurangan gizi, keadaan kesehatan yang buruk dan pendidikan yang rendah.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Meleong, (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data yang diteliti dapat mengalir apa adanya (Alamiah) tanpa adanya seting-seting. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada Peran Lurah dalam menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Pondang.

Menurut Moleong (1996) bahwa perubahan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Karena tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dilapangan. Berkaitan dengan masalah maka Moleong (1996 : 65) memiliki kesimpulan (1) bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Implikasinya bahwa peneliti membatasi masalah studynya dengan focus seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. (2) focus adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti. Pengalaman peneliti adalah pengalaman yang sudah diketahui sebelumnya bahkan penulis berada di wilayah tersebut. Kemudian dalam

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan telah dilaksanakan program P2KP. Penentuan focus dilokasi penelitian didasarkan pada pengalaman peneliti. Dalam penentuan focus suatu penelitian menurut Moleong (1996: 237) memiliki dua tujuan : Pertama, bahwa penetapan focus dapat membatasi study yang berarti dengan adanya focus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua bahwa penentuan focus secara efektif akan menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi (memasukkan dan mengeluarkan suatu masalah) untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Menurut Moleong (1996:237) satu hal yang perlu diperhatikan dan sekaligus perlu disadari oleh peneliti ialah focus penelitian mungkin saja berubah. Perubahan seperti itu bagi penelitian kuantitatif tentu sangat sukar diterima , sebaliknya bagi peneliti kualitatif hal demikian merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan. Penelitian kualitatif mengharapkan demikian karena akan terjadi tingkatan penelitian yang dapat difahami dan dimengerti apa adanya.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka sesuai dengan fokus penelitian ini juga adalah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Untuk penentuan informan ditetapkan sebanyak 7 orang yakni Lurah, Sekretaris Kelurahan, Ketua BKM , Sekretaris BKM , ditambah dengan 3 anggota BKM.

C. Teknik Pengumpulan dan pengolahan data.

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui :

1. Observasi/pengamatan.
2. Wawancara.
3. Data Primer dan data sekunder
4. Study Dokumen.

D. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpatokan pada penelitian kualitatif yang lazim digunakan oleh setiap peneliti, oleh karena itu penulis mengambil petunjuk yang dikembangkan oleh para ahli peneliti kualitatif, yakni berpatokan pada konsep yang dibangun oleh Miles dan Huberman (1992 dalam Moleong ,1996).

Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian Dalam model ini

kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lurah dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :

Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses untuk mendapatkan informasi.

Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada, terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;

Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;

Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan

Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), pera-

latan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.

Salah satu tugas pemerintah Kelurahan (Peran Lurah) dalam implementasi penanggulangan kemiskinan adalah melalui system komunikasi yakni melalui proses kegiatan sosialisasi, serta pembentukan kelembagaan di Kelurahan yakni melalui BKP.

Dalam tataran implementasi program nampak bahwa peran lurah dalam proses untuk mengefektifkan system komunikasi melalui proses kegiatan sosialisasi kepada masyarakat belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jawaban informan berikut ini.

Menurut Informan L.K. bahwa sampai saat ini hingga terdapat program-program di Kelurahan kami, yang namanya bantuan belum pernah mendapatkan sosialisasi, kami sampai saat ini belum tahu kalau ada berbagai program di Kelurahan ; kami hanya tahu ada pembangunan fisik yang diberlakukan diberbagai lingkungan, anggapan kami itu adalah program yang di biyai oleh pemerintah Kabupaten, kami belum tahu apa itu P2KP dan apa sarasanya.

Hal ini dibenarkan pula oleh Informan C.H. dimana menurut beliau bahwa pada saat diberlakukan pemberian dana kepada kelompok masyarakat yakni saya sendiri sebagai anggota penerima dana tidak pernah ada sosialisasi; saya hanya diajak oleh ketua kelompok untuk secara bersama mendapatkan dana tersebut dimana menurut Ketua Kelompok kami bahwa kami akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang dilakukan secara bergulir. Hal ini juga dibenarkan oleh L.M. beliau adalah sebagai Ketua Kelompok Sukamaju, yang mengatakan bahwa pembentukan kelompok yang diberlakukan kepada kami hanya merupakan titipan dari aparat Pemerintah Kelurahan kami langsung disuguhi dengan persyaratan untuk segera membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang dan saya langsung ditunjuk sebagai ketua. Pada hal dalam proses komunikasi seharusnya untuk merekrut ketua kelompok haruslah dipilih. Maka alasan inilah yang menguatkan penulis bahwa proses komunikasi terutama dalam mekanisme sosialisasi program P2KP ini belum dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan mekanisme yang ada. Alasan dari aparat pemerintah Kelurahan ketika penulis mewawancarai R.G. beliau sebagai aparat pemerintah Kelurahan hanya diperintah oleh lurah karena menurut Lurah bahwa pembentukan BKM dianggap sudah mendesak sedangkan waktunya sangat singkat dimasukan dalam jangka waktu yang diberi deline dari Pemerintah Kecamatan dalam tempo dua hari dan kalau tidak dimasukan maka berarti Kelurahan kami tidak akan mendapatkan dana atau program

dari P2KP demikian jawaban Lurah R.J.R.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peran Lurah dalam implementasi penanggulangan kemiskinan melalui system komunikasi yakni melalui proses kegiatan sosialisasi P2KP belum dapat berjalan secara efektif.

Hal lain yang berhubungan dengan implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan tentu berkaitan dengan pembentukan kelembagaan di Kelurahan yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan yakni melalui Lembaga BKM.

BKM merupakan singkatan dari Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan yang merupakan sebuah lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan yang berangkutan.

Dalam kenyataannya pembentukan kelembagaan di kelurahan belum dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas. Pada hal dalam konteks proyek P2KP, sosialisasi bukan hanya diartikan bagaimana program P2KP dapat dipahami oleh masyarakat baik substansi maupun prosedurnya. Sosialisasi bukan sekedar diseminasi atau media publikasi, melainkan bagian dari proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi harus terintegrasi dalam aktivitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk memampukan masyarakat menanggulangi masalah-masalah kemiskinan secara mandiri dan berkesinambungan.

B. Realisasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyara-

kat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

BKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Kenyataannya program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan belum dapat berjalan secara simultan artinya antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan belum dapat terkoordinasi dengan baik. Buktinya dalam kriteria penilaian kemiskinan pada masyarakat tiap instansi memiliki indikator yang berbeda, seperti misalnya BKKBN melalui berbagai bantuan KUKESRA, Kantor Pos melalui dana BLT dan Bulog melalui Beras Miskin (Raskin) tidak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dibangun oleh pemerintah daerah terutama dalam menilai penduduk miskin dari 14 Indikator antara lain : penggunaan air minum; asset; pakaian; penggunaan bahan bakar; kebutuhan makan; tipe rumah; jenis jamban; jenis lantai; konsumsi daging; luas lantai; pendidikan; dan penerangan. Alasan keempat belas indikator tersebut diatas tidak dapat dipakai untuk menentukan rakyat miskin karena syarat dengan muatan politik seperti jalur birokrasi, kolusi, Nepotisme, dan tidak mengena pada sasaran bagi rakyat miskin yang notabene yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seperti Bantuan beras Miskin yang dilakukan oleh Bulog di Kelurahan biasanya syarat dengan kepentingan politik dan tidak tunduk pada prosedur birokrasi karena yang menentukan itu adalah Lurah sendiri. Di tiap lingkungan penerima Raskin biasanya sudah diatur oleh Kepala Lingkungan. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang layak mendapatkan beras justru mereka tidak kebagian. Sedangkan dari daftar nama sesuai dengan

hasil penelitian penulis kenyataannya ada penduduk yang dianggap tidak layak mendapatkan bantuan tersebut justru diberikan. Sebaliknya bagi masyarakat yang layak mendapatkan bantuan justru tidak diikutsertakan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota masyarakat yang penulis wawancarai yakni Ibu L.D. Beliau merupakan seorang janda yang banyak memiliki tanggungan terhadap ketiga cucunya. Dilihat dari kriteria tentang persyaratan penduduk miskin maka yang bersangkutan layak mendapatkan bantuan tersebut. Namun kenyataannya ibu ini tidak mendapatkan bantuan beras miskin. Alasannya Lurah tidak memasukan yang bersangkutan karena terlalu banyak anggota masyarakat penerima sedangkan untuk jatah di kelurahan hanya terbatas yakni hanya sebanyak 340 Kepala keluarga, sedangkan dari daftar yang diusulkan dari tiap lingkungan ternyata melebihi jumlah yang ditargetkan yakni sebanyak 578 Anggota keluarga. Jelas dari jumlah ini Lurah melakukan seleksi untuk mendapatkan bantuan Raskin tersebut. Namun seleksi anggota penduduk miskin masih dianggap subyektif seperti misalnya ada anggota penerima Raskin adalah keluarga dekat dengan Lurah, dan ada pula yang dekat dengan keluarga dari tiap-tiap kepala lingkungan. Sementara ada penduduk yang tidak layak mendapatkan bantuan tersebut justru diberikan pada hal dari pantauan penulis malah ada penduduk yang sudah memiliki penerangan lampu listrik. Menurut Lurah Pondang. R.J.R. pada tahap berikutnya dia akan mengusulkan nama-nama yang tidak termasuk dalam daftar penerima Raskin. Selain itu tiap anggota keluarga sebagai penerima Beras Raskin tidak diberikan dengan Cuma-Cuma melainkan harus membayar sebanyak Rp. 30.000, dalam tiap keluarga yang mendapatkan beras sebanyak 20 KG. berarti dalam 1 Kg dinilai dengan uang sebanyak Rp. 1.500/Kg. Kriteria ini pun seringkali tidak bisa dipenuhi karena pada waktu ditagih uang sebanyak itu bagi penduduk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut sebagai haknya justru diberikan kepada orang lain karena harus ada target yang harus dibebani pada tiap kelurahan yakni harus menyeter sebanyak jumlah penerima beras yang diminta oleh Bulog.

C. Pentingnya Pemberdayaan dalam Implementasi Penanggulangan Kemiskinan.

Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansial dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Program ini dapat terlaksana dengan apabila didukung dengan peran

pemerintah dalam hal ini mewakili pemerintah di Kelurahan adalah Lurah itu sendiri sebagai penanggungjawab. Lurah memiliki tanggungjawab dalam memberdayakan masyarakat dan sebagai pelaku pembangunan lokal yang mewakili pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan manajemen organisasi maka PNPM Mandiri Perkotaan khususnya di Kelurahan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Peran Lurah dalam proses pengelolaannya. Karena Lurah juga sebagai pemeran utama dalam proses pemberdayaan penanggulangan kemiskinan, seperti dalam proses manajemen program. Karena proses pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan dari pihak pemerintah kelurahan. Lurah menjadi kata kunci dalam proses manajemen khususnya dalam menampung aspirasi masyarakat, membentuk BKM, melalui kepanitiaan. Secara umum aktifitas dan partisipasi pemerintah kelurahan dalam program penanggulangan kemiskinan diharapkan akan : 1). menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat. khususnya masyarakat miskin, 2). Mendorong “pelebagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah kelurahan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, 3). Melakukan audit dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri.

Dalam poin pertama tugas lurah dalam proses penanggulangan kemiskinan memiliki kepentingan yang strategis terutama dalam menumbuhkan iklim usaha agar masyarakat miskin dapat diberdayakan, dalam hal ini realisasinya adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang masuk di Kelurahan dapat terkoordinasi dengan baik seperti program P2KP, program BLT, Program bantuan Raskin, program bantuan KUKESRA yang pernah penulis uraikan.

Pada poin kedua tugas Lurah adalah mendorong upaya pelembagaan masyarakat miskin untuk membentuk kelembagaannya sendiri sesuai dengan kemauan mereka sendiri melalui lembaga yang disebut dengan BKM. Sedangkan pada poin ketiga Lurah adalah melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BKM melalui proyek-proyek fisik yang dilaksanakan dilingkungannya dengan proses transparansi dan akuntabilitas.

Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membangun lingkungannya sendiri sangat terasa sekali melalui program P2KP yang dilaksanakan oleh BKM. Dampak yang dirasakan adalah bahwa pembangunan fisik yang dilaksanakan dilingkungan mereka sendiri dapat dirasakan karena diawasi langsung oleh masyarakat, berbeda ketika proyek masuk

dilingkungan mereka melalui system perencanaan dari atas (Top Down Planning) maka masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan. Melalui program P2KP yang dilaksanakan oleh BKM sebagai fasilitator masyarakat dapat merasakan secara langsung proyek fisik yang dibangun oleh mereka karena usulan kegiatannya benar-benar murni dari kemauan masyarakat yang dilaksanakan lewat rembug warga melalui BKM. Disamping itu dampak positif yang dirasakan melalui program P2KP yang dilaksanakan oleh BKM adalah bahwa kualitas proyek fisiknya memiliki kualitas yang cukup baik berbeda dengan sebelumnya dengan menggunakan system tender kualitas proyek dianggap rendah. Adapun proyek-proyek yang digarap oleh BKM berdasarkan data yang ada melalui dana P2KP tahun anggaran 2011 di Kelurahan Pondang dengan dana sebesar k Rp. 250.000.000, dengan aplikasi proyek fisik sebagai berikut :

1. Pembangunan Selokan Air baru
2. Rehabilitasi selokan air
3. Pembangunan Jalan Setapak Baru
4. Rehabilitasi Jalan Setapak
5. Pembangunan Proyek Air Bersih,
6. Pembangunan MCK
7. Pembangunan Pos kamling
8. Pembangunan Jembatan Baru
9. Perbaikan Jembatan.

(Sumber : Diambil dari data BKM Kelurahan Pondang).

Jadi proyek-proyek yang disebutkan diatas memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat di Kelurahan dalam pengembangan infrastruktur kelurahan khususnya dalam memperlancar akses komunikasi dan perekonomian di Kelurahan.

Upaya menanggulangi kemiskinan merupakan usaha yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu proses yang tidak pernah boleh berhenti karena kemiskinan itu sendiri sangat dinamis. Dalam P2KP, masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya, melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan. Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya (di segala bidang), baik di level atas maupun di level bawah. Dalam hal kebijakan pembangunan, tampak jelas lemahnya atau ketidakberdayaan posisi masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin atau lapis bawah (grass roots) dalam proses pengambilan keputusan. Bagaimana program pembangunan atau penanggulangan kemiskinan dapat berhasil apa-

bila kebijakan atau sasarannya salah. Sering terlihat kurangnya koordinasi antar program pembangunan, tetapi justru menunjukkan indikasi adanya ego sektoral antar instansi, sehingga program-program tersebut terkesan kurang saling mendukung. Berbagai program-program intervensi tersebut, dalam kenyataannya cenderung kurang terkoordinasi dan berjalan sendiri-sendiri.

Melalui tulisan ini diharapkan pentingnya pemberdayaan terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kelurahan dapat dilakukan sebagai berikut :

1). Peningkatan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja dalam penanggulangan kemiskinan dapat dianggap penting mengingat jumlah pengangguran bagi masyarakat miskin diperkotaan cukup besar. Masalah kesempatan kerja akan menjadi perhatian dalam proses pemberdayaan.

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud disini adalah paling sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu.

Jadi kesempatan kerja dapat dianggap penting dalam pemberdayaan bagi masyarakat miskin dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok. Terbukanya peluang kesempatan bagi kelompok miskin dalam bekerja maka diharapkan akan dapat menanggulangi kemiskinan.

2). Latihan Kerja

Bagi golongan penduduk miskin usaha untuk mendapatkan pekerjaan biasanya sangat susah bahkan pekerjaan yang mereka tekuni kurang atau tidak memiliki peluang untuk memperbaiki nasib mereka dari keterpurukan. Penduduk miskin biasanya tidak memiliki akses dalam bekerja, mereka seringkali menganggur dan tidak memiliki kegiatan apa-apa. Oleh karena itu dalam tujuan memperoleh pemberdayaan bagi masyarakat miskin maka proses latihan kerja dianggap pentingnya. Maksud pentingnya latihan kerja bagi penduduk miskin adalah menguji ketrampilan atau bentuk karya kerja yang pernah diikuti oleh mereka.

Belum membahas lebih jauh maka penulis akan menguraikan konsep dari pelatihan. Menurut Gomes (1997), Pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Idealnya, pelatihan harus dirancang untuk mewujudkan tujuan

– tujuan organisasi, yang pada waktu bersamaan juga mewujudkan tujuan – tujuan para pekerja secara perorangan. Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling umum karena melalui pelatihan, para pekerja akan menjadi lebih trampil dan akan lebih produktif.

3). Pengembangan Program Kewirausahaan

Masyarakat miskin biasanya tidak memiliki bekal ketrampilan dalam hal beriwirausaha kebiasaan mereka hanya mengandalkan keinginan atau naluri semata kalau ada orang lain berusaha maka mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain, pada hal yang diinginkan dalam kewirausahaan apakah usaha yang mereka lakukan itu ada peluang atau tidak. Oleh karena itu pemberdayaan pada masyarakat miskin perlu dilakukan.

Pengertian kewirausahaan sebenarnya sangat beragam menurut beberapa pendapat. Akan tetapi makna dari pengertian kewirausahaan itu tidak jauh berbeda. Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, bercrepta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya.

Dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersamaan, walaupun memiliki substansi yang agak berbeda.

Perlu difahami bahwa tingkat ketertarikan seseorang untuk berwirausaha dipengaruhi oleh system nilai dan norma-norma sosial yang hidup didalam lingkungan masyarakat. Sikap wirausaha adalah sebuah perilaku ekonomi seseorang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemahaman terhadap wirausaha bagi masyarakat miskin dianggap penting dan menentukan oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan maka penulis dapat menguraikan kesimpulannya sebagai berikut :

1. Kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang rumit dan saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut sering dikatakan sebagai suatu pola "lingkaran setan" yang sangat sulit untuk dipecahkan. Pola tersebut berlangsung secara terus menerus dan bahkan cenderung menimbulkan dampak yang semakin buruk. Rendahnya tingkat kualitas hidup akibat minimnya fasilitas dasar, buruknya mutu sumber daya manusia, etos kerja yang lemah dan sulit berkembang, terbatasnya kemampuan mencari pekerjaan yang layak, rendahnya kemampuan menabung, sulitnya mengakses sumber-sumber permodalan, adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat miskin
2. Faktor eksternal inilah yang memegang peran penting dan strategis dalam melakukan pemberdayaan (empowering) untuk meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat miskin dan tertinggal dalam mengorganisir diri agar secara mandiri mampu melaksanakan program peningkatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan hidup. Pola pemberdayaan masyarakat yang terkonsep, sistematis, terukur dan tepat sasaran merupakan upaya yang tepat dan efektif mendorong kemandirian masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dalam hal di Kelurahan adalah tergantung pada peran Lurah, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa peran lurah dalam penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama dalam pelaksanaan program P2KP di Kelurahan, termasuk dalam pembentukan BKM, melalui proses sosialisasi, serta rekrutmen dalam keanggotaan BKM.
5. program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan belum dapat berjalan secara simultan

artinya antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan belum dapat terkoordinasi dengan baik. Buktinya dalam kriteria penilaian kemiskinan pada masyarakat tiap instansi memiliki indikator yang berbeda.

6. Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansial dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Program ini dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dengan peran pemerintah dalam hal ini mewakili pemerintah di Kelurahan adalah Lurah itu sendiri sebagai penanggungjawab. Lurah memiliki tanggungjawab dalam memberdayakan masyarakat dan sebagai pelaku pembangunan lokal yang mewakili pemerintah Daerah.
7. Pemberdayaan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan khususnya di Kelurahan dapat dilakukan dengan pentingnya peningkatan kesempatan kerja, latihan kerja dan pengembangan kewirausahaan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan nampaknya antara satu instansi dengan instansi lainnya belum dapat terkoordinasi dengan baik melalui kesempatan ini disarankan hendaknya program kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi secara baik antara satu instansi dengan instansi lainnya agar tidak tumpang tindih.
2. Peran Lurah dalam program penanggulangan kemiskinan dianggap penting dan strategis. Melalui tulisan ini disarankan hendaknya dalam proses pemilihan BKM dipercayakan kepada masyarakat untuk memilihnya tanpa adanya intervensi dari Lurah. Karena dengan adanya kemauan masyarakat dalam menentukan masa depan mereka maka akan dapat menunjang program di Kelurahan serta masyarakat akan memiliki rasa tanggungjawab yang sangat besar dalam pelaksanaan pembangunan,
3. Program pengusulan proyek-proyek pembangunan melalui dana P2KP hendaknya dapat melibatkan masyarakat agar supaya proyek yang dilaksanakan di Kelurahan akan mengena sasaran,
4. Usaha pemberdayaan bagi masyarakat miskin dianggap penting dan menentukan melalui tu-

lisan ini disarankan hendaknya program pemberdayaan mengacu pada program pemberian kesempatan kerja, latihan kerja dan program pengembangan kewirausahaan. Contohnya yaitu antara lain :

- a. Bangkitkan kembali budaya Mapalus dalam menanam masal, mengolah lahan- lahan kosong di Kelurahan Pondang untuk ditanami tumbuhan yang bermanfaat untuk ketahanan pangan , obat-obatan dan yang mengandung nilai jual.
- b. Peningkatan latihan kerja yang memungkinkan dilaksanakan di wilayah kelurahan Pondang seperti pembuatan Holobrick/ batako,furniture kayu dan budi daya ikan air laut.
- c. Pelatihan budi daya ternak sapi, kambing dan babi di Kelurahan pondang

DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin, 1998 , Otonomi Daerah, Pradnya Paramita Jakarta

A.W. Wijaya, 2004, Tonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Ateng Syaifuddin 2003, Otonomi daerah, Armico Bandung

Bayu Suryaningrat, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan CV Rajawali Jakarta

C.S.T. Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Armico Bandung

Deepa Narayan,dkk, 2008 Voices of the Poor, CV Rajawali Jakarta.

Dudley Seers 1973, Kemiskinan Penduduk di Negara berkembang, Prenada Media Jakarta.

Esmara 2006, Kemiskinan dan Kebutuhan pokok CV Rajawali Jakarta Sukirno 2000

Fernandes 2000, Kemiskinan dan kerawanan Sosial, PT Sinar harapan Jakarta

Gary Dessler 2003, Prilaku organisasi dan Kinerja perusahaan.PT gramedia Jakarta.

Joko Siswanto, 2003, Pengantar Administrasi Pemerintahan Desa, CV Rajawali Jakarta

Loekman Soetrisno 2007 Kemiskinan nelayan, PT Gramedia Jakarta

Marjun, 1969, Ilmu Pemerintahan, PT Remaja Rosdakarya Bandung

Moleong, Lexy, 1996 Metodologi Penelitian Kualitatif Rosdakarya Bandung .

Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) Analisis Data Kualitatif , Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.

Nasikun 2005, Paradigma pembangunan, CV Alfabeta Bandung

-----, 1994, Pemenuhan kebutuhan Pokok, Lopera Pustaka Utama Yokyakarta.

Nurmanaf 1978, Pola Penanggulangan kemiskinan, Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Oscar Lewis 2006, Pembangunan Pertanian dan permasalahannya, PT Pradnya Paramita Jakarta.

Pamudji, 1986, Administrasi Pembangunan CV Rajawali Jakarta

Prayitno dan Lincolin,1996, Petani Desa dan Kemiskinan Penerbit BPFE Yokyakarta

Rokhmin Dahuri 2012, Laporan Rakernas PDI Perjuangan,

Sudarwati 2007, Kemiskinan Masyarakat Pesisir, CV Rajawali Jakarta.

Syafie, 1994, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Pustaka Pelajar,

Sumber Sapirin, 1997, Jaring-jaring Pemerintahan, PT Gramedia Jakarta

Sales Rafael,1984, Ekonomi Pembangunan, Pusat penerbitan Univeritas Terbuka Jakarta.

Soelistyo 1982, Prilaku Organisasi, PT Rineka Cipta Jakarta.

Saefuddin,dkk 2003, Kemiskinan penduduk, PT Raja Grafindo Persada menanggulangi kemiskinan.